

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada KUPA Kota Padang Tahun 2019 secara detil mendeskripsikan kondisi perekonomian Kota Padang dan pendanaan keuangan Kota Padang. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kebijakan keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan perubahan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan KUPA tahun 2019.

2.1. Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Selama empat tahun terakhir sejak tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada di atas angka nasional. Pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional terlihat pada tahun 2015 sampai tahun 2017, sejak tahun 2015 sampai 2017 Sumatera Barat mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua diantara provinsi-provinsi lainnya di Sumatera. Dan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Sumbar menempati urutan ke empat antar provinsi-provinsi di Sumatera. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Sumbar dibawah angka nasional. Namun dari angka triwulanan setiap tahunnya dari tahun 2015 pertumbuhan triwulan I dan triwulan IV berada diatas angka nasional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat pada tahun 2017 pada harga berlaku mencapai Rp 213,89 triliun terus meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp 230,53 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp. 42,57 juta atau US \$ 2.901,45. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari triwulan I sampai triwulan IV tahun 2018 tumbuh 5,14% melambat dibanding tahun 2017 sebesar 5,29 persen. Dari sisi produksi, kinerja lapangan usaha pertanian yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Sumatera Barat mengalami pertumbuhan dari 3,40 persen tahun 2017 menjadi 3,46% di tahun 2018. Diikuti lapangan usaha perdagangan besar eceran dan reparasi mobil, sepeda motor tumbuh sebesar 6,5% tahun 2017 menjadi 7,03% begitu pula lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang merupakan tiga lapangan usaha utama di Sumbar tumbuh melambat sebesar 7,17% tahun 2017 menjadi 6,47% tahun 2018. Begitu pula untuk triwulan I tahun 2019 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha tersebut.

Ekonomi Sumbar tumbuh moderat, dengan realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 sebesar 4,78% (yoy) atau menurun dibandingkan triwulan IV 2018 sebesar 5,50% (yoy). Secara keseluruhan, perekonomian Sumatera Barat tahun 2018 tumbuh 5,14% (yoy) atau melambat dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,29% (yoy). Sumber penopang pertumbuhan tahun 2018 berasal dari meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi. Sedangkan secara lapangan usaha, pertumbuhan terjadi karena adanya perbaikan kinerja pertanian dan perdagangan.

Kondisi perekonomian Kota Padang adalah bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional serta merupakan representasi dari tingkat kesejahteraan Kota Padang. Kondisi ekonomi Kota Padang saat ini masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Kerangka makro ekonomi Kota Padang memberikan gambaran tentang evaluasi mengenai beberapa indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan juga perkembangan inflasi. Indikator-indikator ini kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi ekonomi.

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan kota. Kondisi ekonomi Kota Padang dapat ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atau Economic Growth merupakan indeks berantai dari masing-masing kegiatan ekonomi. Angka indeks yang dihasilkan bisa didasarkan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pada umumnya yang sering digunakan atau dianalisis oleh para ekonom adalah LPE harga konstan, karena menggambarkan pertumbuhan produksi riil dari masing-masing sektor.

Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Padang selalu berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Berikut disajikan dalam grafis pertumbuhan ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2011-2017



Sumber: BPS 2019

Dari grafis diatas, pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Selalu Berada Diatas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat Sejak Tahun 2012, Disaat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat mengalami perlambatan, Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Relatif Stabil.

Tabel 2.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat
Tahun 2014-2017

Kabupaten/Kota/Provinsi	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
1. Kepulauan Mentawai	5.57	5.20	5.02	5.13
2. Pesisir Selatan	5.80	5.73	5.33	5.42
3. Kab.Solok	5.79	5.44	5.31	5.33
4. Sijunjung	6.02	5.69	5.26	5.27
5. Tanah Datar	5.79	5.33	5.03	5.12
6. Padang Pariaman	6.05	6.14	5.52	5.59
7. Agam	5.92	5.52	5.41	5.43
8. Lima Puluh Kota	5.98	5.61	5.32	5.34
9. Pasaman	5.87	5.34	5.07	5.09
10. Solok Selatan	5.90	5.35	5.12	5.15

Kabupaten/Kota/Provinsi	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
11. Dharmasraya	6.34	5.75	5.42	5.45
12. Pasaman Barat	6.04	5.70	5.33	5.35
13. Padang	6.46	6.41	6.22	6.23
14. Kota Solok	6.01	5.97	5.76	5.78
15. Sawahlunto	6.08	6.03	5.73	5.75
16. Padang Panjang	6.08	5.91	5.80	5.81
17. Bukittinggi	6.20	6.14	6.05	6.08
18. Payakumbuh	6.47	6.19	6.09	6.12
19. Pariaman	5.99	5.79	5.59	5.62
SUMATERA BARAT (Provinsi)	5.88	5.53	5.27	5.29

Sumber: BPS Kota Padang (2019)

Jika dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, Laju pertumbuhan perekonomian Kota Padang yang angkanya masih menjadi nilai yang tertinggi pada tahun 2017. Kota kedua yang memiliki pertumbuhan perekonomian yang tertinggi lainnya adalah Kota Payakumbuh. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki persentase pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Tanah Datar. Laju Pertumbuhan perekonomian menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 2.1. di atas.

Dari tabel 2.1 diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2017 tetap tertinggi dibanding kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat yakni sebesar 6.23% dan disusul berikutnya oleh Kota Payakumbuh sebesar 6,12%, sedangkan terendah pada tahun 2017 adalah Kabupaten Tanah Datar sebesar 5,12%. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang juga lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yakni 5,29%.

Berikut pada tabel 2.2 disajikan tabel laju pertumbuhan PDRB berdasarkan jenis pengeluaran/penggunaan pada tahun 2014-2018.

Tabel 2.1
Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Jenis Pengeluaran/Penggunaan Kota Padang
Tahun 2015-2018

JENIS PENGELUARAN	Laju Pertumbuhan PDRB %							
	2015		2016		2017		Rata-Rata Per-tumbuh-an (%)	2018 *
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%		
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	4,39	(0,01)	4,96	0,13	5,22	0,05	0,06	5,28
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRRT)	4,24	(0,71)	5,48	0,29	4,52	(0,18)	(0,20)	4,32
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,38	2,13	0,75	(0,91)	0,70	(0,07)	0,38	1,08
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,24	0,04	6,31	0,20	3,56	(0,44)	(0,06)	3,50
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	1,82	(0,95)	4,97	1,73	6,92	0,39	0,39	7,31
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	0,60	(0,98)	3,12	4,20	4,26	0,37	1,19	5,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,41	(0,01)	6,22	(0,03)	6,23	0	(0,01)	6,22

*Proyeksi

Sumber: Data diolah dan BPS Kota Padang (2019).

Dari tabel 2.2 diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Padang sebesar 6,22%. Tabel diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan jenis pengeluaran/penggunaan tidak didominasi oleh pengeluaran konsumsi pemerintah, namun didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRRT), serta dari transaksi eksternal (perdagangan antar wilayah). Hal ini sangat baik karena pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh belanja masyarakat sedangkan belanja pemerintah hanya berkontribusi sebesar 1,08% pada tahun 2018.

Selain berdasarkan jenis pengeluaran/penggunaan, berikut disajikan PDRB berdasarkan jenis lapangan usaha tahun 2015-2018. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut diperoleh dengan cara membagi selisih nilai PDRB sektor/sub sektor tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan PDRB sektor/sub sektor tahun sebelumnya, dikalikan 100. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang mencapai sekitar 6,23% dan pada tahun 2018 tumbuh negatif menjadi 6,15%.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2015-2018 berdasarkan jenis lapangan usaha selengkapnya dapat dilihat dari tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang (persen), 2015-2018

Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)							
	2015		2016		2017		Rata-Rata Pertumbuhan (%)	2018*
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,91	6,31	6,16	(10,85)	5,91	(4,06)	(2,87)	5,74
Pertambangan dan Penggalian	5,73	(5,91)	5,45	(4,89)	3,18	(41,65)	(17,48)	2,62
Industri Pengolahan	3,17	(39,50)	3,05	(3,79)	3,49	14,43	(9,62)	3,15
Pengadaan Listrik dan Gas	4,30	(61,91)	10,72	149,30	4,25	(60,35)	9,01	4,63
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,98	21,60	6,14	(12,03)	4,09	(33,39)	(7,94)	3,77
Konstruksi	9,77	4,60	8,48	(13,20)	7,09	(16,39)	(8,33)	6,50
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,36	(4,96)	4,51	(15,86)	6,06	34,37	4,52	6,33
Transportasi dan Pergudangan	8,39	5,80	7,21	(14,06)	8,44	17,06	2,93	8,69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,39	(19,52)	7,73	20,97	10,30	33,25	11,57	11,49
Informasi dan Komunikasi	8,92	20,54	8	(10,31)	10,18	27,25	12,49	11,45
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,83	(53,58)	8,37	118,54	0,34	(95,94)	(10,33)	0,30

Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)							
	2015		2016		2017		Rata-Rata Pertumbuhan (%)	2018*
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
Real Estate	6,53	6,87	4,76	(27,11)	3,16	(33,61)	(17,95)	2,59
Jasa Perusahaan	6,10	2,52	7,29	19,51	5,32	(27,02)	(1,66)	5,23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,65	141,72	4,98	36,44	4,67	(6,22)	57,31	7,35
Jasa Pendidikan	8,36	24,78	9,59	14,71	9,05	(5,63)	11,29	10,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,58	8,33	8,44	(1,63)	8,28	(1,90)	1,60	8,41
Jasa lainnya	9,66	67,71	11,07	14,60	10,17	(8,13)	24,72	12,68
Produk Domestik Regional Bruto	6,41	(0,77)	6,22	(2,96)	6,23	0,16	(1,19)	6,16

**Proyeksi*

Sumber: Data diolah dan BPS Kota Padang (2019)

Dari tabel diatas terlihat bahwa adanya pergeseran sektor yang menjadi penyumbang terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang yakni jika pada tahun 2017 penyumbang terbesar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang adalah penyedia akomodasi dan makan minum yakni 10,30%, maka pada tahun 2018 penyumbang terbesar adalah sektor jasa lainnya sebesar 12,68%. Hal ini mengindikasikan pembangunan ekonomi di Kota Padang berhasil mewujudkan visi Kota Padang menjadi pusat pariwisata.

Pergeseran sektor penyumbang terkecil terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2017 berasal dari sektor jasa keuangan dan asuransi yakni sebesar 0,34%, sedangkan pada tahun 2018 berasal dari sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,30%.

Dengan memperhatikan trend positif pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dan tahun 2018 serta RKPD Tahun 2019 maka mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2019 ditargetkan pertumbuhan ekonomi sama dengan target yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2019 yakni sebesar 6,46%.

2.1.1.2. Struktur Ekonomi Kota Padang

Struktur ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Struktur ekonomi digunakan untuk menunjukkan peran sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan akan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Struktur ekonomi merupakan rasio antara PDRB suatu sektor ekonomi pada suatu tahun dengan total PDRB tahun yang sama. Struktur ekonomi dinyatakan dalam persen.

PDRB menggambarkan aktifitas perekonomian suatu daerah, semakin tinggi produktivitas daerah maka PDRB nya akan semakin besar. Perkembangan PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat tingkat perkembangan aktivitas ekonomi daerah.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah

nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Berikut ini disajikan tabel data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Rp Juta) dari Tahun 2014-2018 berdasarkan data publikasi pada website BPS Kota Padang Tahun 2019.

Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Padang
Tahun 2015-2018

Lapangan Usaha	PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (dalam juta rupiah)			
	2015	2016	2017	*2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.290.028	2.537.994	2.823.105	3.055.478
Pertambangan dan Penggalan	1.554.415	1.609.355	1.676.418	1.787.447
Industri Pengolahan	6.913.713	7.323.616	7.728.574	8.004.863
Pengadaan Listrik dan Gas	43.377	50.964	59.213	66.668
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	65.138	73.972	80.389	86.731
Konstruksi	3.376.182	3.626.182	5.514.660	5.495.895
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.537.071	8.237.077	9.107.907	9.211.272
Transportasi dan Pergudangan	7.199.332	7.940.344	8.806.687	8.903.658
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	578.213	681.025	783.624	803.018
Informasi dan Komunikasi	2.853.433	3.145.570	3.613.189	3.557.825
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.494.446	2.807.133	2.895.918	2.919.705
Real Estat	1.462.735	1.594.601	1.686.245	1.689.156
Jasa Perusahaan	669.368	741.136	788.868	788.024
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.796.379	3.092.228	3.377.840	3.299.741
Jasa Pendidikan	2.226.788	2.559.881	2.704.507	2.686.073
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	667.175	738.839	844.251	805.307
Jasa lainnya	1.020.935	1.200.993	1.391.850	1.321.155
Jumlah	44.920.351	49.296.193	53.883.254	52.221.192

**Proyeksi*

Sumber: Data diolah dan BPS Kota Padang (2019)

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Berikut ini disajikan tabel data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Rp Juta) dari Tahun 2015-2018.

Tabel 2.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Padang
dari Tahun 2015-2018 (Rp Juta)

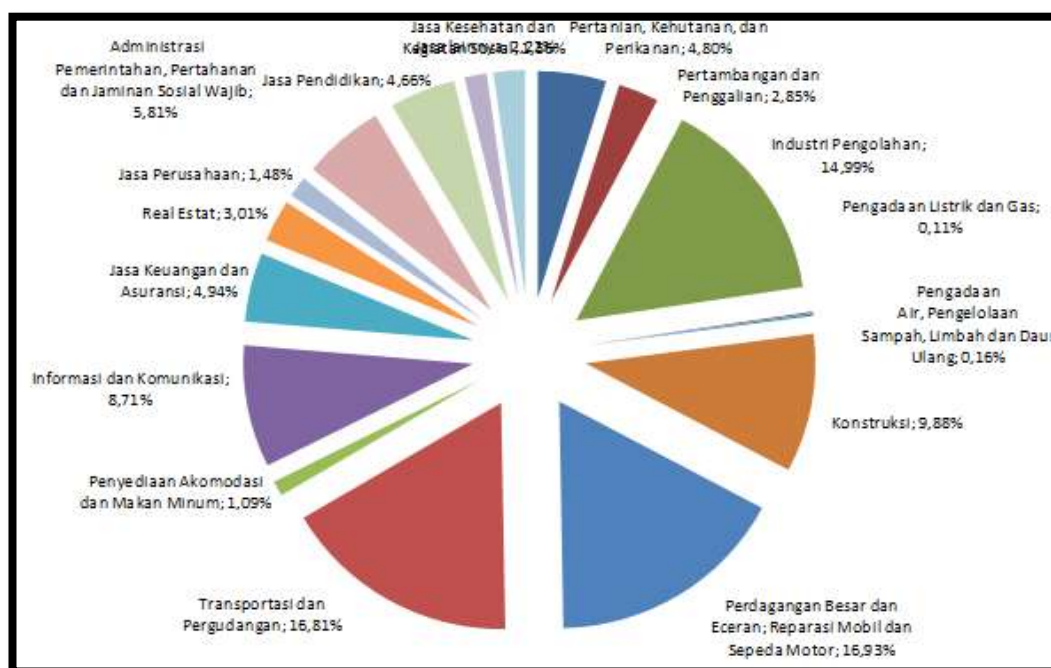
Lapangan Usaha	Tahun			
	2015	2016	2017	2018*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.693.216	1.788.253	1.904.163	2.006.296
Pertambangan dan Penggalian	1.039.292	1.093.785	1.130.821	1.185.779
Industri Pengolahan	5.592.394	5.768.987	5.949.545	6.125.229
Pengadaan Listrik dan Gas	37.412	41.421	43.180	45.871
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	57.944	62.536	64.657	68.342
Konstruksi	3.376.182	3.626.182	3.921.947	4.164.281
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.053.051	6.289.759	6.720.458	6.952.127
Transportasi dan Pergudangan	5.729.205	6.179.732	6.671.554	7.048.303
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	366.495	398.781	431.442	454.441
Informasi dan Komunikasi	2.904.687	3.147.374	3.456.446	3.657.627
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.802.305	1.970.371	1.959.233	2.059.269
Real Estat	1.106.680	1.159.316	1.195.905	1.232.087
Jasa Perusahaan	520.886	558.849	588.565	606.183
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.100.344	2.205.016	2.308.032	2.350.291
Jasa Pendidikan	1.547.775	1.696.276	1.849.812	1.913.314
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	527.988	572.549	619.979	640.742
Jasa lainnya	719.487	799.125	880.395	914.228
Jumlah	35.175.350	37.358.319	39.696.142	40.729.543

*Proyeksi

Sumber: Data diolah dan BPS Kota Padang (2019)

Berdasarkan data PDRB diatas dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Kota Padang pada tahun 2017 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kemudian diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan. Hal ini sesuai dengan visi kota Padang salah satunya menjadi pusat perdagangan dan industri. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat sektor-sektor yang mendominasi struktur ekonomi Kota Padang tahun 2017.

Gambar 2.2
Struktur Ekonomi Kota Padang Tahun 2018



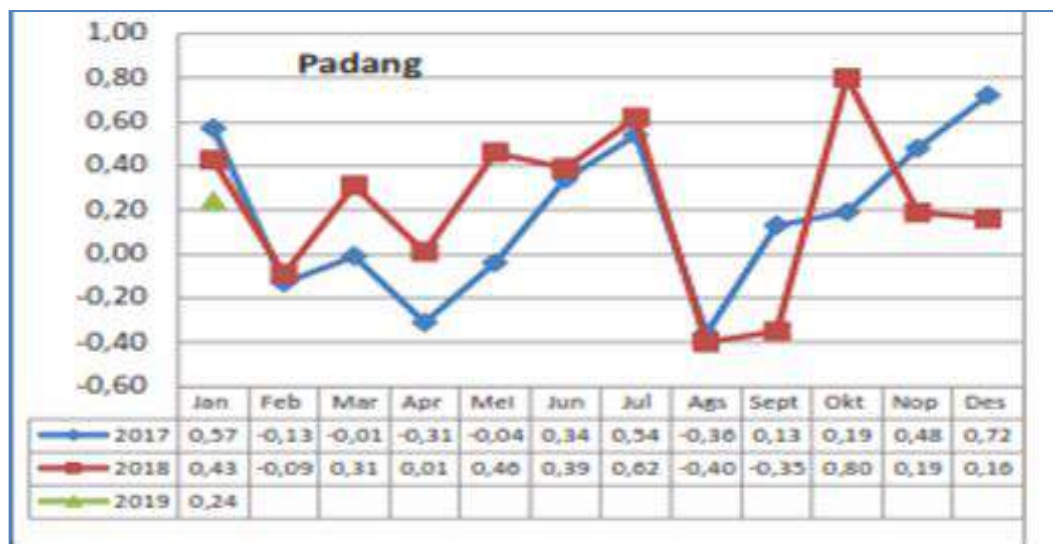
Sumber: BPS Kota Padang, 2019, data diolah

2.1.1.3. Laju Inflasi Kota Padang

Perkembangan inflasi di Kota Padang pada tahun 2013 hingga 2018 sangat terkendali dan rendah. Bahkan pada beberapa bulan nilai inflasi dibawah angka 0. Inflasi di Kota Padang termasuk terendah se-Indonesia dan bahkan berhasil memperoleh penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Hal ini disebabkan karena terkendalinya persediaan serta distribusi sehingga harga dapat dikendalikan oleh pemerintah Kota Padang.

Perkembangan dan perubahan tingkat inflasi tahunan (yoy) dan bulanan (mtm) di Kota Padang tahun 2017-2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.3
Perkembangan Tingkat Inflasi tahunan (yoy) dan Bulanan (mtm)
Kota Padang Tahun 2017-2018



Sumber : BPS Kota Padang, 2019

2.2. Kinerja Pelaksanaan APBD

Untuk dapat mengetahui potensi sumber daya keuangan Kota Padang pada KUPA tahun 2019, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan Kota Padang selama tiga tahun terakhir (tahun 2017-2019/target) beserta kebijakan umum yang menjadi acuannya. Analisis kinerja keuangan Kota Padang dimulai dengan analisis kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta neraca daerah

2.2.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dibagi menurut beberapa jenis meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan klasifikasi pendapatan daerah yang sedikit berbeda, khususnya tentang pendapatan dana transfer. Karena, disamping dana perimbangan yang ditransfer dari pusat, pemerintah daerah juga menerima transfer dari provinsi. Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010, pendapatan daerah diklasifikasikan sebagai Pendapatan Dana Transfer yang meliputi Transfer dari Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Transfer dari Pusat Lainnya, serta Dana Transfer dari Provinsi bagi Kota/Kabupaten. Oleh sebab itu, analisis kinerja pengelolaan keuangan Kota Padang dilakukan dengan mempertimbangkan kedua metode klasifikasi pendapatan daerah ini.

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah Kota Padang selama 5 tahun (2014-2018) terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pertumbuhan rata-rata pertahun pendapatan daerah Kota Padang tahun 2014 hingga tahun 2018 mencapai 4,04%, atau meningkat dari Rp 1.913.522.926.784,44 pada tahun 2014 menjadi Rp 2.160.345.581.454,61 pada tahun 2018.

Apabila dilihat dari pertumbuhan rata-rata setiap tahun dari masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Padang, maka dapat terlihat bahwa PAD memberikan kontribusi pertumbuhan rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan kelompok pendapatan daerah Kota Padang lainnya. Selama kurun waktu tahun 2014-2018, PAD Kota Padang mengalami pertumbuhan sebesar 12,49% pertahun, sedangkan dana perimbangan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,39% pertahun. Lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan pertahun sebesar 18,88% sehingga pendapatan daerah Kota Padang selama kurun waktu tersebut mengalami pertumbuhan pendapatan rata-rata sebesar 4,04% pertahun.

Berikut disajikan tabel realisasi pendapatan daerah serta tingkat perkembangan pertumbuhan dari tahun 2014-2018

Tabel 2.6
Realisasi Pendapatan Daerah dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Jumlah (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	
1	PENDAPATAN	1.913.522.926.784,44	1.616.192.307.112,05	(15,54)	2.007.984.250.248,00	24,24	4,04
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	315.678.797.930,44	375.433.727.165,00	18,93	430.487.860.178,00	14,66	12,49
1.1.1.	Pajak daerah	194.620.516.566,00	232.870.240.318,00	19,65	295.308.809.319,00	26,81	15,98
1.1.2.	Retribusi daerah	55.736.712.374,00	50.512.577.718,00	(9,37)	35.517.013.975,00	(29,69)	(5,46)
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	10.832.007.020,00	15.352.567.191,00	41,73	13.457.775.671,00	(12,34)	1,11
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	54.489.561.970,44	71.678.346.938,05	31,55	86.204.261.213,00	20,27	25,67
1.2.	Dana Perimbangan	1.182.290.915.543,00	1.169.080.233.009,00	(1,12)	1.440.966.268.857,00	23,26	5,37
1.2.1.	Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan Pajak	64.110.864.543,00	46.624.488.009,00	(27,28)	63.579.570.318,00	36,37	2,58
1.2.2.	Dana alokasi umum	1.060.917.648.000,00	1.072.429.395.000,00	1,09	1.120.046.168.000,00	4,44	0,94
1.2.3.	Dana alokasi khusus	57.262.403.000,00	50.026.350.000,00	(12,64)	252.340.530.539,00	404,42	101,08
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	415.553.213.311,00	71.678.346.938,05	(82,75)	136.530.121.213,00	90,48	18,88
1.3.1	Hibah	5.574.706.900,00	14.661.031.420,00	162,99	19.864.727.100,00	35,49	478,59
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	73.727.081.411,00	95.550.833.499,00	29,60	97.628.394.113,00	2,17	12,10
1.3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	323.050.825.000,00		(100,00)			
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.200.600.000,00	12.926.625.000,00	(2,08)	19.037.000.000,00	47,27	(20,29)
1.3.6	Dana Insentif Daerah				5.000.000.000,00	52.752.520.000,00	(46,45)

Sumber: BPKA, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)

Analisis berdasarkan proporsi terhadap total pendapatan menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan Kota Padang sebagaimana yang terjadi selama 5 tahun terakhir merupakan capaian yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan proporsi masing-masing sumber pendapatan daerah Kota Padang. Proporsi semua jenis pendapatan daerah dari sumber PAD dalam 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif kecuali lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah Kota Padang telah berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya dari tahun ke tahun. Akan tetapi jumlah penerimaan PAD tersebut ternyata masih relatif rendah bila dilihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Namun demikian, berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan maka peranan PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami tren positif dalam lima tahun terakhir. Di tahun 2014 rasio PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 16,50% dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 22,58% . Perkembangan selengkapnya dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Perkembangan Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2014 – 2018

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan
2014	1.913.522.926.784	315.678.797.930	16,50%
2015	1.616.192.307.112	375.433.727.165	23,23%
2016	2.007.984.250.248	430.487.860.178	21,44%
2017	2.092.277.707.122	548.653.179.266	26,22%
2018	2.160.345.581.455	487.834.642.412	22,58%

Sumber: BPKAD Kota Padang Tahun 2019, Data Diolah

Walaupun dampaknya belum signifikan, namun naiknya proporsi PAD ini merupakan hal yang positif, karena menggambarkan kemajuan

kemandirian Kota Padang dalam membiayai kebutuhan pembangunannya. Disisi lain, penurunan proporsi dana perimbangan, telah diimbangi dengan peningkatan yang sangat signifikan dari sumber dana penyesuaian.

Tabel 2.8 berikut menunjukkan perkembangan proporsi setiap komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Padang.

Tabel 2.8
Proporsi Pendapatan Daerah Dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun

No.	Uraian		Tahun				Rata-rata Pertumbu han (%)
			2015	2016	2017	2018	
A	Pendapatan Asli Daerah						
1	Pendapatan Pajak Daerah		11,27	12,20	11,41	11,91	11,70
2	Pendapatan Retribusi Daerah		2,45	3,49	2,72	3,69	3,09
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan		0,74	0,96	0,58	0,77	0,76
4	Lain-lain PAD yang Sah		3,47	3,42	1,76	1,59	2,56
5	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		17,93	20,08	16,47	17,96	18,11
B	Pendapatan Transfer						
1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN						
	a	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	2,17	3,89	3,91	4,49	3,61
	b	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	0,09	0,13	0,06	0,11	0,10
	c	Dana Alokasi Umum	51,92	66,52	69,16	77,99	66,40
	d	Dana Alokasi Khusus	8,14	3,59	5,64	1,93	4,83
	e	Sub Jumlah	62,32	74,13	78,78	84,53	74,94
2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA						
	a	Dana	13,79	0	0	0	3,45

No.	Uraian		Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)
			2015	2016	2017	2018	
		Penyesuaian					
	b	Sub Jumlah	13,79	0	0	0	3,45
3		TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
	a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4,63	4,62	4,32	4,50	4,52
	b	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0	0
	c	Sub Jumlah	4,63	4,62	4,32	4,50	4,52
		Jumlah Pendapatan Transfer	80,73	78,75	83,09	81,97	81,14
C	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah						
1		Pendapatan Hibah	0,71	0,35	0,06	0	0,28
2		Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0
3		Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,63	0,83	0,38	0,38	0,56
4		DPPID	0	0	0	0	0
5		DPDF dan PPD	0	0	0	0	0
6		DPPIP	0	0	0	0	0
7		DPIPD	0	0	0	0	0
8		Dana Isentif Daerah	0	0	0	0	0
9		Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0
10		Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	1,34	1,18	0,44	0,08	0,76
		TOTAL PENDAPATAN	100	100,0	100	100	100

Sumber: Data diolah BPKAD Kota Padang (2019)

Terkait dengan capaian kinerja pendapatan daerah pada tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Semester I Pendapatan Daerah
Kota Padang Tahun 2019

Uraian	Capaian Realisasi APBD Tahun 2019			
	APBD TAHUN 2019 (Rp)	Realisasi s/d Juni 2019 (Rp)	Jumlah Belum Terealisasi (Rp)	Realisasi (%)
PENDAPATAN	2.679.316.912.000,00	2.679.316.912.000,00		
Pendapatan Asli Daerah	824.377.000.000,00	240.869.080.439,00	(583.507.919.561,00)	29,22%
Pajak Daerah	565.430.000.000	161.769.826.325	(403.660.173.675,00)	28,61%
Retribusi Daerah	95.876.680.357	19.640.444.769	(76.236.235.588,00)	20,49%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.000.000.000	10.711.218.378	(9.288.781.622,00)	53,56%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	143.070.319.643	48.747.590.967	(94.322.728.676,00)	34,07%
			-	
Dana Perimbangan	1.572.720.218.000,00	794.259.892.422,00	(778.460.325.578,00)	50,50%
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67.421.789.000	25.618.533.950	(41.803.255.050,00)	38,00%
Dana Alokasi Umum	1.169.051.129.000	678.738.603.000	(490.312.526.000,00)	58,06%
Dana Alokasi Khusus	336.247.300.000	89.902.755.472	(246.344.544.528,00)	26,74%
			-	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	282.219.694.000,00	52.234.460.415,00	(229.985.233.585,00)	18,51%
Pendapatan Hibah	128.346.200.000	17.410.967.156	(110.935.232.844,00)	13,57%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101.732.333.000	8.752.933.259	(92.979.399.741,00)	8,60%
Dana Insentif Daerah	52.141.161.000	26.070.560.000	(26.070.601.000,00)	50,00%
			-	#DIV/0!
JUMLAH PENDAPATAN	2.679.316.912.000,00	1.087.363.433.276,00	(1.591.953.478.724,00)	40,58%

Sumber: BPKA (2019)

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian realisasi pendapatan sampai dengan akhir semester I (Januari - Juni 2019) sudah mencapai Rp.1.087.363.433.276,- atau sebesar 40,58% dari target yang ditetapkan. Realisasi PAD sampai akhir Semester I baru mencapai 29,22%, realisasi dana perimbangan sudah mencapai 50,50% dan realisasi Pendapatan Daerah yang sah baru mencapai realisasi sebesar 18,51%.

Berdasarkan hasil evaluasi potensi penerimaan dan realisasi serta target yang telah ditetapkan, maka pada Perubahan KUPA Tahun 2019 untuk PAD tidak berubah dari APBD Tahun 2019, karena masih memungkinkan untuk direalisasi, namun untuk Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami perubahan.

2.2.2. Kinerja Belanja Daerah

Pengklasifikasian belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan berbagai metode, antara berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 atau berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah belum digunakan dalam penyusunan RKPD tahun 2020. Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh sebab itu, pelaksanaan belanja langsung bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Komponen belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah diklasifikasikan atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer bagi hasil ke desa. Dalam belanja operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan belanja modal akan diklasifikasikan sesuai dengan bidang aset, yaitu belanja modal tanah, peralatan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta aset lainnya. Pembahasan dalam bab ini akan dilakukan pengklasifikasian belanja daerah berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 dan PP Nomor 71 tahun 2010.

Jika dirangking berdasarkan jumlahnya, tiga kelompok belanja daerah yang terbesar adalah belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai, baik langsung maupun tidak langsung, mengalami peningkatan dari Rp 948.378.377,22 pada tahun 2015 menjadi Rp 2.177.863,60 pada tahun 2018, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 131,64% pertahun.

Tabel 2.10
Realisasi Belanja Daerah Dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun(Dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	2015	2016		2017		2018		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG								
	1 Belanja Pegawai	1.118.095.035.567,00	1.155.722.352.648,00	3,37	911.621.636.240	(21,12)	955.031.355.407,00	4,76	(4,33)
	2 Belanja Bunga	1.249.605.000,00	1.703.208.768,00	36,30	4.546.933.296	166,96	5.272.577.971,00	15,96	73,07
	3 Belanja Subsidi	-							
	4 Belanja Hibah	18.873.698.000,00	43.421.291.500,00	130,06	51.672.962.250	19,00	79.522.667.771,00	53,90	67,65
A	5 Belanja Bantuan Sosial	437.460.000,00	808.262.000,00	84,76	614.527.000	(23,97)	3.644.800.000,00	493,11	184,63
	6 Belanja Bagi Hasil	-							
	7 Belanja Bantuan Keuangan	5.582.867.000,00	675.135.000,00	(87,91)	663.064.362	(1,79)	2.476.823.250,00	273,54	61,28
	8 Belanja Tidak Terduga	404.498.128,00	382.884.989,00	(5,34)	644.490.980	68,32	69.143.564,00	(89,27)	(8,76)
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.144.643.163.695,00	1.202.713.134.905,00	5,07	969.763.614.128,00	(19,37)	1.046.017.367.963,00	7,86	(2,14)
	BELANJA LANGSUNG								
	1 Belanja Pegawai	19.946.767.600,00	23.892.452.760,00	19,78	27.682.340.250	15,86	32.180.556.852,00	16,25	17,30
B	2 Belanja Barang dan Jasa	496.335.266.602,96	538.588.332.362,00	8,51	682.165.984.856	26,66	679.923.744.692,00	(0,33)	11,61
	3 Belanja Modal	287.576.579.422,00	408.310.076.287,00	41,98	397.843.408.958	(2,56)	419.741.929.318,00	5,50	14,97
	Jumlah Belanja Langsung	803.858.613.624,96	970.790.861.409,00	20,77	1.107.691.734.064,00	14,10	1.131.846.230.862,00	2,18	12,35
	JUMLAH BELANJA	1.948.501.777.319,96	2.173.503.996.314,00	11,55	2.077.455.348.192,00	(4,42)	2.177.863.598.825,00	4,83	3,99

Sumber: BPKA, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)

Analisis belanja daerah berdasarkan pengklasifikasian yang sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dan dengan menggunakan data tahun 2015-2018, menunjukkan bahwa perkembangan kinerja total belanja Kota Padang cenderung lebih baik. Belanja Pemerintah Kota Padang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah total belanja sebesar Rp. 1.948.501.777.319,96 meningkat menjadi Rp. 2.177.863.598.825 pada tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah kota padang adalah sebesar 3,99% Peningkatan belanja terjadi pada belanja langsung dengan rata-rata pertumbuhan 12,35% sedangkan belanja tidak langsung rata-rata turun sebesar 2,14%. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Padang berkomitmen kuat mempergunakan dana yang tersedia untuk pembangunan (belanja langsung).

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Semester I Belanja Daerah
APBD Kota Padang Tahun 2019

Uraian	Capaian Realisasi APBD Tahun 2019			
	APBD TAHUN 2019 (Rp)	Realisasi s/d Juni 2019 (Rp)	Jumlah Belum Terealisasi (Rp)	Realisasi (%)
BELANJA DAERAH	2.727.105.911.818,00	787.220.339.440,00	(1.939.885.572.378,00)	28,87%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.236.098.879.068,00	442.589.571.580,00	(793.509.307.488,00)	35,81%
Belanja Pegawai	1.166.668.922.158	429.879.829.136	(736.789.093.022,00)	36,85%
Belanja Bunga	4.198.402.972	2.417.796.680	(1.780.606.292,00)	57,59%
Belanja Hibah	42.504.775.000	10.014.585.000	(32.490.190.000,00)	23,56%
Belanja Bantuan Sosial	12.663.140.000	160.500.000	(12.502.640.000,00)	1,27%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	888.309.104	0	(888.309.104,00)	0,00%
Belanja Tidak Terduga	9.175.329.834	116.860.764	(9.058.469.070,00)	1,27%
			-	#DIV/0!
BELANJA LANGSUNG	1.491.007.032.750	344.630.765.878	(1.146.376.266.872,00)	23,11%
			-	
JUMLAH BELANJA	2.727.105.911.818,00	787.220.337.458,00	(1.939.885.574.360,00)	28,87%

Sumber: BPKA Kota Padang (2019)

Dari tabel target dan realisasi belanja daerah sampai dengan akhir semester I Tahun 2019 (Januari-Juni), jumlah yang terealisasi masih sebesar 28,87% atau sebesar Rp. 787.220.339.440,-. Masih rendahnya nilai realisasi disebabkan belanja atas kegiatan cenderung dilakukan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan.

Untuk Perubahan KUPA Tahun 2019, direncanakan jumlah belanja langsung mengalami perubahan dari APBD Tahun 2019, begitu juga untuk belanja tidak langsung nilainya berubah.

2.2.3. Kinerja Pembiayaan

Pada setiap tahun SiLPA tahun sebelumnya akan dijadikan sebagai Pembiayaan Terima dan dianggarkan semua penerimaan daerah dapat dibelanjakan pada tahun berikutnya. Akan tetapi karena adanya keterbatasan dalam pelaksanaan anggaran, maka pada setiap tahun masih sering terjadi SiLPA. Selain itu SiLPA juga menunjukkan adanya upaya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Padang pada tahun anggaran tersebut

Tabel 2.12

Perkembangan Realisasi Pembiayaan dan Rata-Rata Pertumbuhan Pertahun (Dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun								Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015		2016		2017		2018		
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
	Penggunaan SiLPA	328.764.004.323,53	43,81	310.247.843.096,62	(5,63)	116.180.840.499,54	(62,55)	151.190.837.219,57	30,13	1,44
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	32.543.546.000,00	-	25.687.637.790,00	(21,07)	20.401.816.755,00	-	(5,27)
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	328.764.004.323,53	43,81	342.791.389.096,62	4,27	141.868.478.289,54	(58,61)	171.592.653.974,57	20,95	2,60
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				-		-		-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-		-	-
	Penyertaan Modal Pem. Daerah	17.500.000.000,00	(8,00)	22.500.000.000,00	28,57	5.500.000.000,00	(75,56)	20.000.000.000,00	263,64	52,16
	Pembay. Pokok Pinj. DN Lainnya	-	-	-	-	-	-	24.998.668.293,00	-	-
	Pembay. Pokok Pinj. DN Obligasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	17.500.000.000,00	(8,00)	22.500.000.000,00	28,57	5.500.000.000,00	(75,56)	44.998.668.293,00	718,16	165,79
	PEMBIAYAAN NETTO	311.264.004.323,53	48,51	320.291.389.096,62	2,90	136.368.478.289,54	(57,42)	126.593.985.681,57	(7,17)	(3,29)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	310.247.843.096,62	(5,64)	116.180.840.499,54	(62,55)	151.190.837.219,57	30,13	108.996.762.655,0	(27,86)	(16,48)

Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)

2.2.4. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, pencairan dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Terkait dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi dari PP Nomor 24 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010, maka analisa neraca digunakan hanya untuk tahun 2015-2018 dengan pertimbangan kesamaan standar akuntansi pemerintah yang digunakan. Tabel berikut menyajikan perkembangan pos-pos neraca dan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun.

Tabel 2.13
Perkembangan Pos-Pos Neraca Dan Rata_Rata Pertumbuhan Per Tahun (Dalam Juta Rupiah)

URAIAN	2015	2016		2017	2018		Rata-Rata Tingkat Pertumbuhan (%)
	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	
ASET							
Aset Lancar	417.432.036.928	250.884.251.316	(39,90)	274.678.176.332	236.377.018.904	(13,94)	(14,79)
Investasi Jangka Panjang	78.714.898.886	89.864.868.778	14,17	146.698.522.989	163.432.695.452	11,41	29,61
Aset Tetap	6.234.382.565.261	6.225.845.209.493	(0,14)	6.624.996.873.606	6.451.113.500.294	(2,62)	1,22
Aset Lainnya	69.405.796.281	314.520.159.091	353,16	78.361.864.213	269.874.366.990	244,40	174,16
Total Aset	6.799.935.297.357	6.881.114.488.678	1,19	7.124.735.437.141	7.120.797.581.640	(0,06)	1,56
							-
KEWAJIBAN							-
Kewajiban Jangka Pendek	7.383.715.941	25.200.981.440	241,30	49.228.691.060	32.900.471.210	(33,17)	101,16
Kewajiban Jangka Panjang	6.527.758.755	32.543.546.000	398,54	58.231.183.790	26.829.237.057	(53,93)	141,18
Total Kewajiban	13.911.474.697	57.744.527.440	315,09	107.459.874.850	59.729.708.267	(44,42)	118,92
							-
EKUITAS							-
Jumlah Ekuitas	6.786.023.822.660	6.823.369.961.238	0,55	7.017.275.562.291	7.061.067.873.373	0,62	1,34
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.799.935.297.357	6.881.114.488.678	1,19	7.124.735.437.141	7.120.797.581.640	(0,06)	1,56

Sumber: BPKA, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)

Untuk memahami kemampuan keuangan Kota Padang dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan yani rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

1. Rasio likuiditas, bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas berarti semakin tinggi kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya. Analisis rasio likuiditas dapat dilakukan berdasarkan rasio lancar, rasio quick, dan rasio kas. Ketiga rasio sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang lancarnya pada saat jatuh tempo, tetapi rasio kas lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki.
2. Analisis solvabilitas, bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage, dimana rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauhmana organisasi menggunakan dana pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total hutang dengan total aset, dan atau total hutang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan. Tabel 2.14 berikut menyajikan rasio keuangan Kota Padang.

Tabel 2.14
Perkembangan Rasio Keuangan dan Pertumbuhan Rata-Rata
per tahun (Dalam %)

Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Rasio
2016	250.884.251.316,05	25.200.981.440,26	996%
2017	274.678.176.332,48	49.228.691.059,51	558%
2018	239.131.280.748,48	32.729.321.210	731%

Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Kota Padang, (diolah)

Rasio lancar khususnya atas rasio quick (quick ratio) Pemerintah Kota Padang mempunyai nilai yang baik, yaitu mencapai 12,21% pada tahun 2016. Rasio quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat.

Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang, dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Tabel 3.14 menunjukkan bahwa rata-rata rasio total kewajiban terhadap total aset dan rasio kewajiban terhadap modal adalah hanya 68%. Hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Kota Padang dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal pemerintah Kota Padang.

Hasil rasio lancar pemerintah kota sangat bagus, karena aktiva lancar yang dimiliki oleh pemerintah kota padang mampu untuk menutupi semua kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan tingkat kemampuan pemerintah untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya, namun tetap bagus karena besar dari 100%.

Jika lakukan dengan perhitungan dengan menggunakan cash rasio atas laporan keuangan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.15
Perhitungan Cash Ratio atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang
Tahun 2016-2018

Tahun	Kas dan Setara Kas	Hutang Lancar	Rasio
2016	135.084.916.941,54	25.200.981.440,26	536%
2017	151.307.943.766	49.228.691.059,51	307%
2018	109.022.560.655,18	32.729.321.210	333%

Sumber: BPKA Kota Padang (2019)

Analisis solvabilitas, bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage, dimana rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauhmana organisasi menggunakan dana pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total hutang dengan total aset, dan atau total hutang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan.

Berikut disajikan perhitungan rasio solvabilitas dengan menggunakan total debt to total asset ratio Pemerintah Kota Padang tahun 2016-2018.

Tabel 2.16
Perhitungan total debt to total asset ratio atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2016-2018

Tahun	Total Hutang	Total Aktiva	Rasio
2016	57.744.527.440,26	6.881.114.488.677,77	1%
2017	107.459.874.849,51	7.124.735.437.140,94	2%
2018	59.626.468.267	7.125.104.872.207,53	1%

Sumber: BPKA Kota Padang (2019)

Berdasarkan rasio ini, jika hasilnya semakin kecil maka akan semakin aman. Berdasarkan rasio diatas, rasio di setiap tahunnya sangat kecil. Sehingga dapat dikatakan berdasarkan Total Debt to Total Assets Ratio Pemerintah Kota Padang sangat aman.

2.3. Rencana Kebijakan Pengelolaan Keuangan

2.3.1. Pendapatan

Dalam memproyeksikan pendapatan Kota Padang sampai tahun 2019 digunakan asumsi yakni penetapan anggaran pendapatan Kota Padang tahun 2019 telah melalui analisis oleh eksekutif dan legislatif serta capaian pada semester pertama tahun 2019. Selain itu kebijakan realisasi pendapatan daerah juga didasarkan pada kebijakan keuangan pemerintah provinsi dan pusat terkait dengan dana perimbangan. Oleh sebab itu, anggaran pendapatan pada APBD tahun 2019 dapat dijadikan tolak ukur atau standar dalam menentukan dalam menghitung proyeksi pendapatan pada KUPA Tahun 2019.

Karena dalam memproyeksikan pendapatan daerah tersebut di atas digunakan data-data masa lalu, berarti asumsi yang digunakan bahwa peningkatan pendapatan tersebut dihasilkan sesuai dengan kebijakan pada KUPA tahun 2019.

2.3.2. Belanja

Kebijakan belanja yang akan dilakukan dimasa akan datang antara lain adalah:

1. Kebijakan Belanja sesuai dengan prioritas; mulai dari belanja wajib dan mengikat, belanja administrasi rutin, belanja program unggulan, dan perioritas lainnnnya.
2. Melakukan efesiensi anggaran terhadap jenis belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, perjalanan dinas, dan belanja barang dan jasa, serta dianggarkan secara selektif.

3. Belanja langsung diprioritaskan untuk membiayai belanja modal yang dapat memberikan *multiflier effect* dalam pertumbuhan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.4. Perubahan Proyeksi Keuangan Tahun 2019

Dalam memproyeksikan perubahan keuangan APBD Kota Padang tahun 2019 digunakan beberapa asumsi dan kebijakan.

2.4.1. Pendapatan Daerah

Adapun kebijakan terkait dengan perubahan pendapatan daerah pada KUPA Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Jumlah Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019 tidak mengalami perubahan atas total pendapatan daerah yakni sebesar Rp. 824.377.000.000,-. Perubahan yang terjadi pada PAD hanya pada rincian objek pajak dan retribusi dengan memperhatikan potensi penerimaan pada tahun 2019.
2. Jumlah Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan mengalami peningkatan sebesar Rp.209.985.000,- dibanding pada APBD Tahun 2019 yakni dari sebesar Rp. 1.572.720.218.000,- menjadi Rp. 1.572.930.203.000,-. Perubahan didasarkan pada jumlah yang akan direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi terkait dengan dana perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil dari Pajak Cukai Hasil Tembakau untuk Kota Padang pada tahun 2019.
3. Jumlah Pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp. 19.989.932.638,00 dari semula sebesar Rp. 282.219.694.000,00 menjadi Rp. 302.209.626.638,00 yang bersumber dari pengurangan pendapatan hibah sebesar Rp. 593.200.000,00 dan peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 20.583.132.638,00.
4. Jumlah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pembiayaan pada KUPA Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.8.377.762.837,- atau meningkat dari Rp. 47.888.999.818,- pada APBD Tahun 2019 menjadi Rp. 56.166.762.655,- Tahun 2019. Perubahan dilakukan atas realisasi SILPA tahun 2018 dan penyesuaian atas pembayaran pokok pinjaman daerah yang jatuh tempo.

Berikut dijelaskan dalam tabel dibawah ini terkait dengan perubahan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang pada KUPA Tahun 2019.

Tabel 2.17
Perubahan target Pendapatan Daerah Kota Padang pada KUPA Tahun 2019

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS-P 2019	+/-	%
PENDAPATAN	2.679.316.912.000,00	2.699.516.829.638,00	20.199.917.638,00	0,75
Pendapatan Asli Daerah	824.377.000.000,00	824.377.000.000,00	-	-
Pajak Daerah	565.430.000.000,00	565.430.000.000,00	-	-
Retribusi Daerah	95.876.680.357,00	95.876.680.357,00	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	143.070.319.643,00	143.070.319.643,00	-	-
			-	
Dana Perimbangan	1.572.720.218.000,00	1.572.930.203.000,00	209.985.000,00	0,01
Dana Bagi Hasil Pajak	65.015.632.000,00	65.225.617.000,00	209.985.000,00	0,32
Bagi Hasil Bukan Pajak	2.406.157.000,00	2.406.157.000,00	-	-
Dana Alokasi Umum	1.169.051.129.000,00	1.169.051.129.000,00	-	-
Dana Alokasi Khusus	336.247.300.000,00	336.247.300.000,00	-	-
			-	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	282.219.694.000,00	302.209.626.638,00	19.989.932.638,00	7,08
Pendapatan Hibah	128.346.200.000,00	127.753.000.000,00	(593.200.000,00)	(0,46)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101.732.333.000,00	122.315.465.638,00	20.583.132.638,00	20,23
Dana Insentif Daerah	52.141.161.000,00	52.141.161.000,00	-	-

Tabel 2.18
Perubahan target Pendapatan Asli Daerah Kota Padang KUPA Tahun 2019

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	2.679.316.912.000,00	2.699.516.829.638,00	20.199.917.638,00	0,75
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	824.377.000.000,00	824.377.000.000,00		
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	565.430.000.000,00	565.430.000.000,00		
4.1.1.01.	Pajak Hotel	40.000.000.000,00	42.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5,00
4.1.1.01.02.	Hotel Bintang Lima	600.000.000,00	599.987.500,00	(12.500,00)	(0,00)
4.1.1.01.03.	Hotel Bintang Empat	13.578.000.000,00	14.500.000.000,00	922.000.000,00	6,79
4.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga	11.920.000.000,00	13.095.000.000,00	1.175.000.000,00	9,86
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua	7.920.000.000,00	7.800.000.000,00	(120.000.000,00)	(1,52)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.1.01.06.	Hotel Bintang Satu	2.480.000.000,00	2.700.000.000,00	220.000.000,00	8,87
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	2.979.500.000,00	3.202.962.500,00	223.462.500,00	7,50
4.1.1.01.12.	Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel/ Rumah Kos	522.500.000,00	102.050.000,00	(420.450.000,00)	(80,47)
4.1.1.02.	Pajak Restoran	48.000.000.000,00	51.000.000.000,00	3.000.000.000,00	6,25
4.1.1.02.01.	Restoran	26.760.578.000,00	27.256.380.000,00	495.802.000,00	1,85
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	12.457.120.000,00	12.754.320.000,00	297.200.000,00	2,39
4.1.1.02.03.	Kafetaria	4.165.000.000,00	5.863.965.000,00	1.698.965.000,00	40,79
4.1.1.02.05.	Katering	539.000.000,00	1.496.000.000,00	957.000.000,00	177,55
4.1.1.02.09.	Bofet	2.718.302.000,00	1.880.000.000,00	(838.302.000,00)	(30,84)
4.1.1.02.10.	Bakery	1.360.000.000,00	1.749.335.000,00	389.335.000,00	28,63
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00		
4.1.1.03.01.	Tontonan Film/Bioskop	2.952.000.000,00	3.886.500.000,00	934.500.000,00	31,66
4.1.1.03.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana		63.000.000,00	63.000.000,00	
4.1.1.03.05.	Pameran		10.000.000,00	10.000.000,00	
4.1.1.03.07.	Karaoke	1.325.000.000,00	1.285.000.000,00	(40.000.000,00)	(3,02)
4.1.1.03.09.	Sirkus/Akrobat/Sulap		25.500.000,00	25.500.000,00	
4.1.1.03.10.	Permainan Biliar	765.000.000,00	603.500.000,00	(161.500.000,00)	(21,11)
4.1.1.03.14.	Balap Kendaraan Bermotor		56.000.000,00	56.000.000,00	
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	6.000.000.000,00	4.806.000.000,00	(1.194.000.000,00)	(19,90)
4.1.1.03.16.	Panti Pijat/Refleksi	70.000.000,00	481.000.000,00	411.000.000,00	587,14
4.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran		75.500.000,00	75.500.000,00	
4.1.1.03.19.	Pertandingan Olahraga	175.000.000,00	175.000.000,00		
4.1.1.03.24.	Musik Room	605.000.000,00	231.000.000,00	(374.000.000,00)	(61,82)
4.1.1.03.25.	Tempat Rekreasi	108.000.000,00	302.000.000,00	194.000.000,00	179,63
4.1.1.04.	Pajak Reklame	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00		
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	6.344.030.000,00	6.344.030.000,00		
4.1.1.04.02.	Reklame Kain	3.610.152.000,00	3.610.152.000,00		
4.1.1.04.03.	Reklame Melekat/Stiker	10.400.000,00	10.400.000,00		
4.1.1.04.04.	Reklame Selebaran	8.820.000,00	8.820.000,00		
4.1.1.04.06.	Reklame Udara	3.600.000,00	3.600.000,00		
4.1.1.04.12.	Reklame Bersinar	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00		
4.1.1.04.13.	Reklame Kendaraan	72.998.000,00	72.998.000,00		

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	120.000.000.000,00	117.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(2,50)
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	120.000.000.000,00	117.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(2,50)
4.1.1.07.	Pajak Parkir	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir.	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
4.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah.	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00		
4.1.1.09.01.	Pajak Sarang Burung Walet.	10.000.000,00	10.000.000,00		
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	54.000.000.000,00	54.000.000.000,00		
4.1.1.11.06.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	54.000.000.000,00	54.000.000.000,00		
4.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	120.420.000.000,00	133.420.000.000,00	13.000.000.000,00	10,80
4.1.1.13.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	120.420.000.000,00	133.420.000.000,00	13.000.000.000,00	10,80
4.1.1.14.	Pajak Bumi dan Bangunan	150.000.000.000,00	135.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(10,00)
4.1.1.14.01.	Pajak Bumi dan Bangunan/PBB	150.000.000.000,00	135.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(10,00)
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	95.876.680.357,00	95.876.680.357,00		
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	41.732.677.859,00	41.732.677.859,00		
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.964.802.840,00	14.964.802.840,00		
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman	2.015.625.000,00	2.015.625.000,00		
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	5.113.130.132,00	5.113.130.132,00		
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	11.382.236.920,00	11.382.236.920,00		
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.902.384.000,00	2.902.384.000,00		
4.1.2.01.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.435.000.000,00	1.435.000.000,00		
4.1.2.01.11.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	707.200.000,00	707.200.000,00		
4.1.2.01.13.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00		
4.1.2.01.14.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.612.298.967,00	1.612.298.967,00		

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	26.256.002.498,00	26.256.002.498,00		
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.194.061.000,00	3.194.061.000,00		
4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	407.998.860,00	407.998.860,00		
4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	127.735.000,00	127.735.000,00		
4.1.2.02.09.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	9.652.268.638,00	9.652.268.638,00		
4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.589.750.000,00	8.589.750.000,00		
4.1.2.02.13.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.284.189.000,00	4.284.189.000,00		
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	27.888.000.000,00	27.888.000.000,00		
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	26.880.000.000,00	26.880.000.000,00		
4.1.2.03.02.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	80.000.000,00	80.000.000,00		
4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek	760.000.000,00	760.000.000,00		
4.1.2.03.06.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	168.000.000,00	168.000.000,00		
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00		
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00		
4.1.3.01.02.	BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00		
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	143.070.319.643,00	143.070.319.643,00		
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	7.290.264.184,00	7.290.264.184,00		
4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	100.000.000,00	100.000.000,00		
4.1.4.01.23.	Pendapatan Royalti	7.090.264.184,00	7.090.264.184,00		
4.1.4.01.25.	Penjualan Gedung	100.000.000,00	100.000.000,00		
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00		
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00		
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00		
4.1.4.03.01.	Pendapatan Bunga Deposito.	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00		

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	956.956.965,00	956.956.965,00		
4.1.4.04.01.	Kerugian Uang Daerah	956.956.965,00	956.956.965,00		
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	400.000.000,00	400.000.000,00		
4.1.4.06.03.	Bidang Pekerjaan Umum	400.000.000,00	400.000.000,00		
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	11.904.239.045,00	11.904.239.045,00		
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	750.000.000,00	750.000.000,00		
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	300.000.000,00	300.000.000,00		
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	200.000.000,00	200.000.000,00		
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	263.000.000,00	263.000.000,00		
4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	70.000.000,00	70.000.000,00		
4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	70.000.000,00	70.000.000,00		
4.1.4.07.10.	Pendapatan denda administrasi bagi notaris atau PPAT	15.000.000,00	15.000.000,00		
4.1.4.07.11.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.184.042,00	1.184.042,00		
4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.235.055.003,00	10.235.055.003,00		
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	77.638.000,00	77.638.000,00		
4.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	76.638.000,00	76.638.000,00		
4.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	1.000.000,00	1.000.000,00		
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00		
4.1.4.09.01.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00	450.000.000,00		
4.1.4.09.02.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		
4.1.4.10.06.	Pendapatan dari Pengembalian Setoran	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.4.14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000.000,00	50.000.000,00		
4.1.4.14.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00		
4.1.4.19.	Pendapatan dari Organisasi Kesehatan	48.732.143.449,00	48.732.143.449,00		
4.1.4.19.09.	Penerimaan Pendidikan Kesehatan	386.354.595,96	386.354.603,00	7,04	
4.1.4.19.11.	Pendapatan BPJS RSUD	28.703.738.853,04	30.656.686.104,00	1.952.947.250,96	6,80
4.1.4.19.12.	Pendapatan Dari Pelayanan Kesehatan	19.642.050.000,00	17.689.102.742,00	(1.952.947.258,00)	(9,94)
4.1.4.20.	Pendapatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.344.000.000,00	1.344.000.000,00		
4.1.4.20.01.	Lain-lain Pendapatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.344.000.000,00	1.344.000.000,00		
4.1.4.21.	Pelayanan Transportasi	10.452.778.000,00	10.452.778.000,00		
4.1.4.21.01.	Pelayanan Bus Rapid Transportation (BRT)	10.452.778.000,00	10.452.778.000,00		
4.1.4.23.	Pendapatan dari rusunawa	1.257.300.000,00	1.257.300.000,00		
4.1.4.23.01.	Pendapatan sewa rusunawa	1.257.300.000,00	1.257.300.000,00		
4.1.4.25.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	36.600.000.000,00	36.600.000.000,00		
4.1.4.25.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP.	36.600.000.000,00	36.600.000.000,00		
4.1.4.26.	Pelayanan Parkir Meter	355.000.000,00	355.000.000,00		
4.1.4.26.01.	Kontribusi Parkir Meter	355.000.000,00	355.000.000,00		

Terkait dengan kebijakan perubahan keuangan pada dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada KUPA Tahun 2019 berikut diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.18
Perubahan Target Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kota Padang KUPA Tahun 2019

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	2.679.316.912.000,00	2.699.516.829.638,00	20.199.917.638,00	0,75
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	824.377.000.000,00	824.377.000.000,00		
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.572.720.218.000,00	1.572.930.203.000,00	209.985.000,00	0,01
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67.421.789.000,00	67.631.774.000,00	209.985.000,00	0,31
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	65.015.632.000,00	65.225.617.000,00	209.985.000,00	0,32
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	8.250.821.000,00	8.250.821.000,00		
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	56.764.811.000,00	56.764.811.000,00		
4.2.1.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Cukai Hasil Tembakau		209.985.000,00	209.985.000,00	
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.406.157.000,00	2.406.157.000,00		
4.2.1.02.15.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara	1.121.402.000,00	1.121.402.000,00		
4.2.1.02.16.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	256.895.000,00	256.895.000,00		
4.2.1.02.17.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	983.593.000,00	983.593.000,00		
4.2.1.02.18.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	44.267.000,00	44.267.000,00		
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.169.051.129.000,00	1.169.051.129.000,00		
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	1.169.051.129.000,00	1.169.051.129.000,00		
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	1.169.051.129.000,00	1.169.051.129.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	336.247.300.000,00	336.247.300.000,00		
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Reguler	100.390.508.000,00	100.390.508.000,00		
4.2.3.01.01.	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	33.408.569.000,00	33.408.569.000,00		
4.2.3.01.02.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	24.699.568.000,00	24.699.568.000,00		
4.2.3.01.03.	Dana Alokasi Khusus Bidang	37.381.771.000,00	37.381.771.000,00		

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Pendidikan				
4.2.3.01.10.	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	1.039.884.000,00	1.039.884.000,00		
4.2.3.01.14.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	2.479.536.000,00	2.479.536.000,00		
4.2.3.01.17.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata	1.381.180.000,00	1.381.180.000,00		
4.2.3.03.	Dana Alokasi Khusus Penugasan	18.066.402.000,00	18.066.402.000,00		
4.2.3.03.02.	Dana Alokasi Khusus Penugasan Irigasi	4.344.392.000,00	4.344.392.000,00		
4.2.3.03.04.	Dana Alokasi Khusus Penugasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	792.958.000,00	792.958.000,00		
4.2.3.03.05.	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	2.356.530.000,00	2.356.530.000,00		
4.2.3.03.06.	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Penyediaan Air Minum	3.233.391.000,00	3.233.391.000,00		
4.2.3.03.07.	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi	7.339.131.000,00	7.339.131.000,00		
4.2.3.04.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	217.790.390.000,00	217.790.390.000,00		
4.2.3.04.02.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	177.277.719.000,00	177.277.719.000,00		
4.2.3.04.03.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.698.000.000,00	1.698.000.000,00		
4.2.3.04.05.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	10.538.400.000,00	10.538.400.000,00		
4.2.3.04.06.	Bantuan Operasional Kesehatan	13.911.613.000,00	13.911.613.000,00		
4.2.3.04.07.	Akreditasi Rumah Sakit	550.000.000,00	550.000.000,00		
4.2.3.04.08.	Akreditasi Puskesmas	1.624.458.000,00	1.624.458.000,00		
4.2.3.04.09.	Jaminan Persalinan	334.000.000,00	334.000.000,00		
4.2.3.04.10.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.607.451.000,00	2.607.451.000,00		
4.2.3.04.11.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.913.313.000,00	1.913.313.000,00		
4.2.3.04.12.	Bantuan Operasional Pendidikan dan Kesenjangan	6.365.700.000,00	6.365.700.000,00		
4.2.3.04.13.	Dana Penguatan Kapasitas Fiskal	448.000.000,00	448.000.000,00		

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Koperasi dan UKM				
4.2.3.04.14.	Dana Pelayanan Kepariwisata	521.736.000,00	521.736.000,00		
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	282.219.694.000,00	302.209.626.638,00	19.989.932.638,00	7,08
4.3.1.	Pendapatan Hibah	128.346.200.000,00	127.753.000.000,00	(593.200.000,00)	(0,46)
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00		
4.3.1.01.01.	Pemerintah	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00		
4.3.1.06.	Hibah Dana BOS	110.346.200.000,00	109.753.000.000,00	(593.200.000,00)	(0,54)
4.3.1.06.01.	Hibah Dana BOS SD	72.639.200.000,00	72.248.000.000,00	(391.200.000,00)	(0,54)
4.3.1.06.02.	Hibah Dana BOS SMP	37.707.000.000,00	37.505.000.000,00	(202.000.000,00)	(0,54)
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	101.732.333.000,00	122.315.465.638,00	20.583.132.638,00	20,23
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	101.732.333.000,00	122.315.465.638,00	20.583.132.638,00	20,23
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	19.843.700.000,00	25.858.339.046,00	6.014.639.046,00	30,31
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	33.644.288.000,00	28.697.788.392,00	(4.946.499.608,00)	(14,70)
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.068.706.000,00	40.743.826.761,00	11.675.120.761,00	40,16
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	216.066.000,00	716.505.567,00	500.439.567,00	231,61
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	18.959.573.000,00	26.299.005.872,00	7.339.432.872,00	38,71
4.3.6.	Dana Insentif Daerah	52.141.161.000,00	52.141.161.000,00		
4.3.6.01.	Dana Insentif Daerah.	52.141.161.000,00	52.141.161.000,00		
4.3.6.01.01.	Dana Insentif Daerah..	52.141.161.000,00	52.141.161.000,00		

2.4.2. Belanja Daerah

Terkait dengan belanja daerah pada KUPA Tahun 2019 mengalami perubahan terhadap APBD Tahun 2019 sebagai berikut.

- Belanja Langsung pada KUPA Tahun 2019 sebesar Rp. 1.478.567.601.882,-.
- Belanja Tidak Langsung pada KUPA Tahun 2019 sebesar Rp. 1.277.115.990.411,- terdapat beberapa perubahan yakni terkait dengan peningkatan pada belanja pegawai dan belanja hibah dan bantuan sosial.

Berikut disajikan dalam bentuk tabel perubahan belanja daerah pada KUPA Tahun 2019.

Tabel 2.19
Perubahan Belanja Daerah Pada KUPA Kota Padang Tahun 2019

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS-P 2019	+/-	%
BELANJA DAERAH	2.727.105.911.818,00	2.755.683.592.293,00	28.577.680.475,00	1,05
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.258.993.231.068,00	1.277.115.990.411,00	18.122.759.343,00	1,44
Belanja Pegawai	1.189.563.274.158,00	1.194.480.663.501,00	4.917.389.343,00	0,41
Belanja Bunga	4.198.402.972,00	4.198.402.972,00	-	-
Belanja Hibah	42.504.775.000,00	53.238.595.000,00	10.733.820.000,00	25,25
Belanja Bantuan Sosial	12.663.140.000,00	15.134.690.000,00	2.471.550.000,00	19,52
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	888.309.104,00	888.309.104,00	-	-
Belanja Tidak Terduga	9.175.329.834,00	9.175.329.834,00	-	-
BELANJA LANGSUNG	1.468.112.680.750,00	1.478.567.601.882,00	10.454.921.132,00	0,71

2.4.3. Pembiayaan Daerah

Pada KUPA Tahun 2019, perubahan atas pembiayaan daerah hanya pada rincian SiLPA yang diperoleh dari realisasi tahun 2018 yakni sebesar Rp. 108.996.762.655,18 serta jumlah pembayaran pokok pinjaman daerah. Berikut disajikan dalam bentuk tabel terkait dengan pembiayaan daerah pada KUPA Tahun 2019.

Tabel 2.20
Perubahan Pembiayaan Daerah Pada KUPA Tahun 2019

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS-P 2019	+/-	%
PEMBIAYAAN DAERAH	47.788.999.818,00	56.166.762.655,00	8.377.762.837,00	17,53
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00	108.996.762.655,00	8.996.762.655,00	9,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	100.000.000.000,00	108.996.762.655,00	8.996.762.655,00	9,00
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			-	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	108.996.762.655,00	8.996.762.655,00	9,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	52.211.000.182,00	52.830.000.000,00	618.999.818,00	1,19
Penyertaan Modal (Investasi)	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	-	-
Pembayaran Pokok Utang	26.211.000.182,00	26.830.000.000,00	618.999.818,00	2,36
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.211.000.182,00	52.830.000.000,00	618.999.818,00	1,19

Berdasarkan uraian kebijakan perubahan diatas, tabel berikut menjelaskan Struktur Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah pada KUPA tahun 2019 dan dipersandingkan dengan realisasi tahun 2018 dan rencana pada tahun 2020 berdasarkan RKPD tahun 2020.

Tabel 2.21
Struktur PPAS Perubahan APBD Tahun 2019

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS-P 2019	+/-	%
PENDAPATAN	2.679.316.912.000,00	2.699.516.829.638,00	20.199.917.638,00	0,75
Pendapatan Asli Daerah	824.377.000.000,00	824.377.000.000,00	-	-
Pajak Daerah	565.430.000.000,00	565.430.000.000,00	-	-
Retribusi Daerah	95.876.680.357,00	95.876.680.357,00	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	143.070.319.643,00	143.070.319.643,00	-	-
			-	
Dana Perimbangan	1.572.720.218.000,00	1.572.930.203.000,00	209.985.000,00	0,01
Dana Bagi Hasil Pajak	65.015.632.000,00	65.225.617.000,00	209.985.000,00	0,32
Bagi Hasil Bukan Pajak	2.406.157.000,00	2.406.157.000,00	-	-
Dana Alokasi Umum	1.169.051.129.000,00	1.169.051.129.000,00	-	-
Dana Alokasi Khusus	336.247.300.000,00	336.247.300.000,00	-	-
			-	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	282.219.694.000,00	302.209.626.638,00	19.989.932.638,00	7,08
Pendapatan Hibah	128.346.200.000,00	127.753.000.000,00	(593.200.000,00)	(0,46)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101.732.333.000,00	122.315.465.638,00	20.583.132.638,00	20,23
Dana Insentif Daerah	52.141.161.000,00	52.141.161.000,00	-	-
			-	
JUMLAH PENDAPATAN	2.679.316.912.000,00	2.699.516.829.638,00	20.199.917.638,00	0,75
			-	
BELANJA DAERAH	2.727.105.911.818,00	2.755.683.592.293,00	28.577.680.475,00	1,05
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.258.993.231.068,00	1.277.115.990.411,00	18.122.759.343,00	1,44
Belanja Pegawai	1.189.563.274.158,00	1.194.480.663.501,00	4.917.389.343,00	0,41
Belanja Bunga	4.198.402.972,00	4.198.402.972,00	-	-
Belanja Hibah	42.504.775.000,00	53.238.595.000,00	10.733.820.000,00	25,25
Belanja Bantuan Sosial	12.663.140.000,00	15.134.690.000,00	2.471.550.000,00	19,52
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	888.309.104,00	888.309.104,00	-	-
Belanja Tidak Terduga	9.175.329.834,00	9.175.329.834,00	-	-
			-	
BELANJA LANGSUNG	1.468.112.680.750,00	1.478.567.601.882,00	10.454.921.132,00	0,71
			-	
JUMLAH BELANJA	2.727.105.911.818,00	2.755.683.592.293,00	28.577.680.475,00	1,05
			-	
SURPLUS/DEFISIT	(47.788.999.818,00)	(56.166.762.655,00)	(8.377.762.837,00)	17,53

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS-P 2019	+/-	%
PEMBIAYAAN DAERAH	47.788.999.818,00	56.166.762.655,00	8.377.762.837,00	17,53
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00	108.996.762.655,00	8.996.762.655,00	9,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	100.000.000.000,00	108.996.762.655,00	8.996.762.655,00	9,00
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			-	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	108.996.762.655,00	8.996.762.655,00	9,00
			-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	52.211.000.182,00	52.830.000.000,00	618.999.818,00	1,19
Penyertaan Modal (Investasi)	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	-	-
Pembayaran Pokok Utang	26.211.000.182,00	26.830.000.000,00	618.999.818,00	2,36
			-	
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.211.000.182,00	52.830.000.000,00	618.999.818,00	1,19
PEMBIAYAAN NETTO	47.788.999.818,00	56.166.762.655,00	8.377.762.837,00	17,53
			-	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SiLPA)	-	-	-	-

